



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 87 /KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 62/KEP/HK/2025 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 62/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 62/KEP/HK/2025, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 62/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 62/KEP/HK/2025 tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN : ...

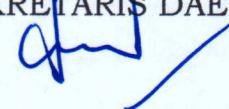
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 62/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Maret 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<u>R</u>
Plh. Kepala Biro Hukum	<u>K</u>
Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	<u>X</u>

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : **87 /KEP/HK/2025**TANGGAL : **6 Maret 2025**

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 62/KEP/HK/2025 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BULANAN,
TRIWULAN DAN SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mongoordinasikan Tim dalam penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
6	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Semesteran.
7	Kasubid. Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada anggota Tim Penyusun; b. melakukan koordinasi terkait penyusunan laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; c. melakukan koordinasi terkait investasi daerah (permanen); d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Belanja Daerah dan Aset Daerah; e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Pengeluaran Pembiayaan; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

8	Kasubid. Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada anggota Tim Penyusun; b. melakukan koordinasi terkait penyusunan laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Pendapatan Daerah; d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Piutang Daerah; e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.
9	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
10	Vincentia Nona, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
11	Jun Erna Nawi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rekonsiliasi SPJ Fungsional; b. melakukan Pengujian SPJ Fungsional; c. melakukan verifikasi atas SPM UP/GU/TU; d. melakukan Jurnal/Buku Besar, Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan e. menguji kebenaran laporan bulanan Perangkat Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.
12	Kristianus Th. K. Asan, Amd/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rekonsiliasi SPJ Fungsional; b. melakukan Pengujian SPJ Fungsional; c. melakukan verifikasi atas SPM UP/GU/TU; d. melakukan Jurnal/Buku Besar, Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan e. menguji kebenaran laporan bulanan Perangkat Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.
13	Yeti M. Toda, SE, M.Si/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rekonsiliasi SPJ Fungsional; b. melakukan Pengujian SPJ Fungsional; c. melakukan verifikasi atas SPM UP/GU/TU; d. melakukan Jurnal/Buku Besar, Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan e. menguji kebenaran laporan bulanan Perangkat Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.
14	Wahyu Santi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rekonsiliasi SPJ Fungsional; b. melakukan Pengujian SPJ Fungsional; c. melakukan verifikasi atas SPM UP/GU/TU; d. melakukan Jurnal/Buku Besar, Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan e. menguji kebenaran laporan bulanan Perangkat Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.
15	Afliana N. Bria Seran, SE, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rekonsiliasi SPJ Fungsional; b. melakukan Pengujian SPJ Fungsional; c. melakukan verifikasi atas SPM UP/GU/TU; d. melakukan Jurnal/Buku Besar, Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan e. menguji kebenaran laporan bulanan Perangkat Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.
16	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rekonsiliasi SPJ Fungsional; b. melakukan Pengujian SPJ Fungsional; c. melakukan verifikasi atas SPM UP/GU/TU; d. melakukan Jurnal/Buku Besar, Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan e. menguji kebenaran laporan bulanan Perangkat Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.

17	Jacklyn Asrit, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		a. melakukan rekonsiliasi SPJ Fungsional; b. melakukan Pengujian SPJ Fungsional; c. melakukan verifikasi atas SPM UP/GU/TU; d. melakukan Jurnal/Buku Besar, Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan e. menguji kebenaran laporan bulanan Perangkat Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.
18	Nuzulul Atmayhuda Putri, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
19	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
20	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasi dan bertanggungjawab atas Pelaksanaan Operasional SIPKD.
21	Yustina S. Kedang/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
22	Antonius Doinisius Lamahoda/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
23	Maria Elisabeth Th.M Repu, SE/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		a. melakukan verifikasi bukti penerimaan pada B IX; b. melakukan rekapitulasi piutang dan pembiayaan; c. melakukan rekapitulasi SP2D; dan d. membuat kertas kerja PFK.
24	Hermanus Pello Nggadas, S.Sos/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
25	Nyoman A.K.Ch. Merthayasa, SH/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
26	Lilyan Yunike Hage, S.Pd/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
27	Henderina Kaho/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
28	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
29	Ivan Januar Christian, S.St/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
30	Aleksander Sina Wuan/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

31	Viligijs Raga Pita/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan verifikasi bukti penerimaan pada B IX; b. melakukan rekapitulasi piutang dan pembiayaan; c. melakukan rekapitulasi SP2D; dan d. membuat kertas kerja PFK.
32	Musa Duru/ Pelaksana pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plh. Kepala Biro Hukum	K
Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	A